

ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI PAPUA

KARTIM

Dosen Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Yapis Papua

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran, asimetri informasi, tekanan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap senjangan anggaran. Populasi dalam penelitian ini adalah 50 OPD Provinsi Papua sedangkan sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 94 orang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket (kuesioner) yang disebar kepada responden. Model analisis yang digunakan uji regresi linear berganda. Program yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan IBM SPSS versi 23.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap senjangan anggaran. Hal ini dibuktikan dengan membandingkan nilai T_{tabel} (1,662) dengan nilai T_{hitung} (2,277 > 1,662) dengan nilai signifikan 0,025. Asimetri informasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap senjangan anggaran. Hal ini dibuktikan dengan membandingkan nilai T_{tabel} (1,662) dengan nilai T_{hitung} (-2,269 > 1,662) dengan nilai signifikan 0,026. Tekanan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap senjangan anggaran. Hal ini dibuktikan dengan membandingkan nilai T_{tabel} (1,662) dengan nilai T_{hitung} (3,290 > 1,662) dengan nilai signifikan 0,001. Dan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap senjangan anggaran. Hal ini dibuktikan dengan membandingkan nilai T_{tabel} (1,662) dengan nilai T_{hitung} (855 > 1,662) dengan nilai signifikan 0,395. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan partisipasi anggaran, asimetri informasi, tekanan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap senjangan anggaran. Hal ini dibuktikan dengan membandingkan nilai F_{hitung} > F_{table} (26,525 > 2,47) dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05.

Kata kunci : Partisipasi Anggaran, Asimetri Informasi, Tekanan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Senjangan Anggaran.

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi di berbagai bidang yang sedang berlangsung di Indonesia telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik. Salah satu agenda reformasi yaitu dengan adanya otonomi daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam bidang keuangan daerah, fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia adalah relatif kecilnya peranan (kontribusi) Pendapatan Asli Daerah (PAD) didalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain, peranan/kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk sumbangan dan bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, mendominasi susunan APBD Tambunan(2002).

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah Halim(2007).

Salah satu faktor yang mempengaruhi Kemandirian keuangan daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Putri (2014) Apabila PDRB meningkat, maka hal ini mengindikasikan terdorongnya peningkatan pendapatan asli daerah. Tingginya PDRB yang dihasilkan oleh suatu daerah mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat.

Faktor berikut yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah adalah jumlah penduduk. Menurut Badan Pusat Statistik (2015), penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Faktor yang ketiga yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah adalah Dana Alokasi Umum (DAU) Menurut Halim (2004), Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Selanjutnya faktor terakhir yang berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Menurut Yani (2002) dana alokasi khusus dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

Berangkat dari fenomena yang terjadi di sebagian besar SKPD di Indonesia hasil kajian-kajian empiris diatas ternyata menunjukkan adanya ambivalensi hasil penelitian. Artinya ambivalensi atau kontradiksi hasil penelitian tersebut sebenarnya adalah research gap (kesenjangan penelitian) yang oleh Agusty, (2006) disebutkan bahwa research gap tersebut dapat atau seharusnya dikembangkan sebagai masalah penelitian yang perlu diinventigasi lebih lanjut.

Berdasarkan pertimbangan inilah maka penulis berkeinginan melakukan penelitian secara lebih mendalam dengan judul penelitian “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pemerintah Provinsi Papua)”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah ?
2. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah ?
3. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah ?
4. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah?
5. Apakah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana alokasi Khusus (DAK) secara parsial berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah ?

C. Tinjauan Pustaka

1. Teori Agensi

Grand theory dalam Penelitian ini menggunakan *Stakeholder Theory*. Bryson (2001) mendefinisikan *stakeholder* ialah suatu individu, kelompok, atau organisasi apapun yang dapat

melakukan klaim terhadap sumber daya atau hasil dari organisasi atau dipengaruhi oleh hasil itu. Keberhasilan dalam organisasi publik maupun swasta ialah sejauhmana organisasi tersebut dapat menjamin kepuasan *stakeholder* utama (masyarakat sebagai *stakeholder* utama). Pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam roda pemerintahan harus menekankan aspek kepentingan rakyat selaku *stakeholder* dan pemerintah juga harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah serta yang berupa asset daerah untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan isi dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam yang dikuasai pemerintah harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kondisi ekonomi yang terjadi di suatu daerah. PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu satu tahun. Pada dasarnya, PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB disajikan menurut harga konstan dan harga berlaku.

Perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku dilakukan dengan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Pada metode langsung dikenal ada tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Metode tak langsung biasa digunakan jika data yang diperlukan untuk menghitung PDRB tidak tersedia. Perhitungan PDRB atas dasar harga konstan bertujuan untuk melihat perkembangan PDRB secara riil (tidak ada pengaruh harga). Ada empat cara yang dikenal untuk menghitung nilai tambah atas dasar harga konstan, yaitu: revaluasi, ekstrapolasi, deflasi dan deflasi berganda.

3. Jumlah Penduduk

Menurut Badan Pusat Statistik (2015), penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Jumlah Penduduk dalam penelitian ini adalah keseluruhan penduduk yang berada pada Kabupaten/Kota di Jayapura. Darmanto (2012) menyatakan bahwa salah satu indikator yang mencerminkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik, yaitu pemerintah daerah yang dapat memberikan pelayanan yang baik kepada

publik. Jumlah populasi penduduk yang menempati daerah juga berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Semakin besar Jumlah Penduduk suatu daerah, maka akan menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Jumlah Penduduk mempengaruhi kemandirian keuangan pemerintah daerah. Semakin banyak Jumlah Penduduk maka semakin banyak pula tuntutan pada pemerintah daerah atas pelayanan publik yang baik.

4. Dana Alokasi Umum (DAU)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 21 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan dana alokasi umum adalah bagian dari dana perimbangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang diberikan setiap tahunnya yang diambil dari dana APBN, dimana besarnya dana yang diberikan tersebut ditentukan oleh kebutuhan daerah dan potensi daerah.

berdasarkan pendekatan kesenjangan fiskal, besarnya DAU yang diterima oleh kabupaten/kota di seluruh Indonesia didasarkan pada ketentuan berikut ini Halim(2007):

- a. Dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- b. Dana alokasi umum untuk daerah Provinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan sebesar 10% dan 90% dari DAU sebagaimana tersebut di atas.
- c. Dana alokasi umum untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

5. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 24 tentang Dana Perimbangan dinyatakan bahwa Dana alokasi khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Sesuai dengan tujuannya untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah dengan tujuan khusus, DAK diberikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sebagai berikut:

- a. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain.
- b. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi.
- c. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir kepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan sarana yang memadai.
- d. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan.
- e. Pembangunan jalan, rumah sakit, irigasi dan air bersih DAK disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah. Oleh karena itu, DAK dicantumkan dalam APBD. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas.

6. Kemandirian Keuangan Daerah

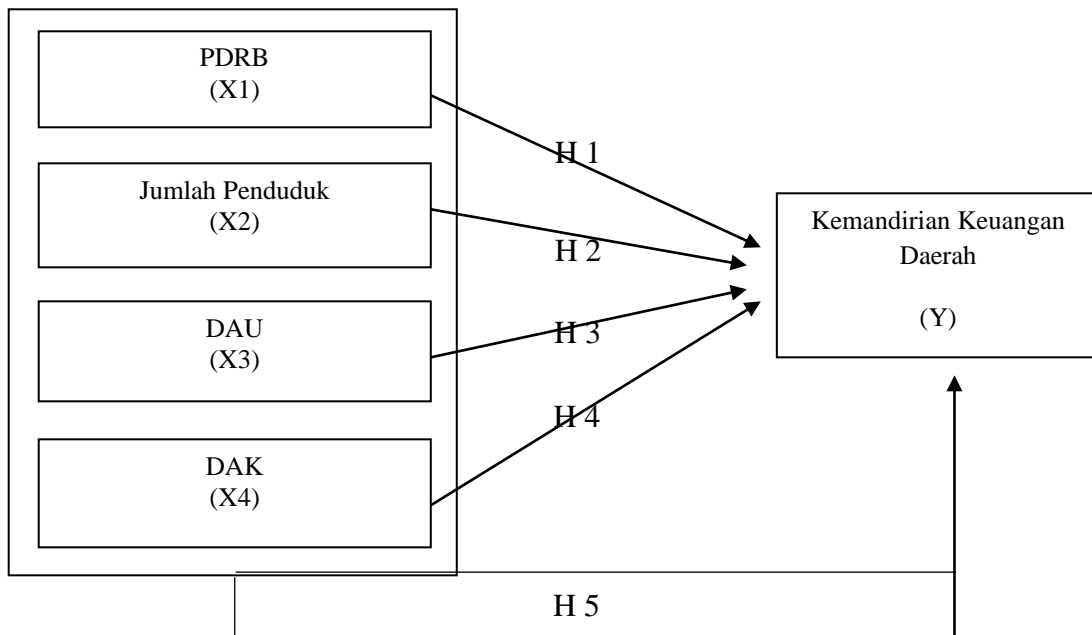
Halim (2001) mengemukakan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern, terutama pemerintah pusat dan propinsi semakin rendah. Formula yang digunakan untuk menentukan tingkat kemandirian daerah, yaitu dengan menggunakan rasio kemandirian daerah, sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

D. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan di atas, maka dapat digambarkan sebuah

kerangka pemikiran yang dapat menjelaskan hubungan. variabel-variabel yang diteliti pada gambar berikut ini



Gambar 2.1.
Kerangka Konseptual

E. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual dan model penelitian di atas dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

- H1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Papua.
- H2. Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Papua
- H3. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Papua.
- H4. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Keandirian Keuangan Daerah Provinsi Papua.
- H5. Variabel PDRB, Jumlah Penduduk, DAU, DAK secara simultan berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Papua.

F. Populasi dan Sampel penelitian.

Populasi adalah sebagai seperangkap unit analisis yang lengkap yang sedang diteliti Sarwono(2006). Populasi dalam penelitian ini ada dua, yaitu berupa data statistik Provinsi Papua, dan data rincian DAU dan DAK yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan Sampel dipilih berdasarkan metode purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan

sampel yang representif sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

Adapun sampel dan kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data statistik PDRB dan Jumlah Penduduk pada beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Papua pada tiga tahun terakhir.
2. Data rincian transfer DAU dan DAK dari pusat pada beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Papua pada tiga tahun terakhir.

G. Variabel penelitian

1. Kemandirian Daerah:Kemandirian Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah. Kemandirian Daerah di proxy dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah Dermayasa dan Bagiada(2013).
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit-unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi disuatu wilayah. PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB atas dasar harga

- konstan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Papua
3. Jumlah Penduduk :Jumlah Penduduk dalam penelitian ini adalah keseluruhan penduduk yang berada pada Kabupaten/Kota Provinsi Papua. Penelitian ini mengacu pada Jumlah Penduduk hasil proyeksi berdasarkan sensus penduduk tahun 2011 sampai tahun 2016
 4. Dana Alokasi Umum (DAU) : dana yang bersumber dari penerimaananggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerahdalam bentuk *block grant* yang pemanfaatan diserahkan sepenuhnya kepadadaerah. Variabel ini diukur melalui besarnya target DAU yang diperolehdaerah kabupaten/kota pada setiap tahun anggaran.
 5. Dana Alokasi Khusus (DAK) : dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat

H. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka (dokumentasi data) dari sumber-sumber data sekunder dengan cara mempelajari, mengklarifikasi, menganalisis data sekunder berupa data statistik, data rincian dana transfer dari pusat berupa DAU dan DAK maupun data lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

I. Metode Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berhubungan dengan pengumpulan data, peringkasan data, penyamplingan dan penyajian hasil peringkasan tersebut. Statistik deskriptif akan digunakan untuk mendeskripsikan secara statistik variabel-variabel dalam penelitian ini. Untuk mengetahui deskripsi data diperuntukan ukuran yang lebih ringkas, yaitu ringkasan statistik. Ukuran yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, media dan deviasi standar.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS 17, normalitas dideteksi dengan alat analisis grafik berupa PP

Plot dan uji Kolmogorov Smirnov dengan melihat nilai signifikan residualnya. Jika nilai signifikan berada di atas nilai signifikan 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat normalitas (Ghozali 2005, h.110).

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas terjadi ketika variabelindependen yang ada dalam model berkorelasi satu sama lain, ketika korelasi antarvariabel independen sangat tinggi maka sulit untuk memisahkan pengaruhmasing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.Pengujian terhadap multikolinearitas dideteksi menggunakan tolerancevalue dan variance inflation factor (VIF), jika nilai tolerance value > 0.10 danVIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas Ghozali (2005).

c. Uji Autokorelasi

Tujuan pengujian ini adalah untuk meneliti apakah sebuah model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai DW Hitung dengan nilai dl (lower bound) dan du (upperbound) dari DW Tabel.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan lain. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah residual (Yprediksi-Ysesungguhnya) yang telah di-studentized. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

J. Uji Hipotesis

1. Metode analisis regresi linier berganda

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear dua atau lebih variabel independen (X₁,X₂. . . . X_n) dengan variabel dependen (Y). regresi berganda. Model regresi linear berganda:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Kemandirian Keuangan Daerah

α = Konstanta

X₁ = PDRB

X₂ = Jumlah Penduduk

X₃ = DAU

X_4 = DAK
 β = Koefisien regresi
 ε = Standar eror

2. Uji signifikan parsial (uji t)

Uji t (t-test) digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi (significant level) yang digunakan sebesar 5%.

3. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji hipotesis lain yang juga digunakan adalah dengan menggunakan uji F dengan tingkat signifikan 5%. Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Kriteria pengujianya adalah; jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) yaitu untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai Koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

K. Pembahasan

1. Pengaruh PDRB terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan teknik analisis regresi linear berganda, variabel PDRB memiliki koefisien regresi sebesar 4,906 nilai thitung sebesar 4,886 dengan probabilitas signifikansi sebesar ,000. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan nilai thitung $>$ ttabel ($4,886 > 1,695$) dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian variabel X_1 memiliki kontribusi terhadap Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Provinsi Papua. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat PDRB mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Pemerintah Daerah tinggi dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Taryoko (2016) dan Putri (2014) yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Namun penelitian

ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariasih (2011) yang menyatakan PDRB tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

2. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan teknik analisis regresi linear berganda, variabel Jumlah Penduduk memiliki koefisien regresi sebesar 1,034 nilai thitung sebesar 1,763 dengan probabilitas signifikansi sebesar ,088. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa Jumlah Penduduk memiliki pengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan nilai thitung $>$ ttabel ($1,763 > 1,695$) dengan nilai signifikansi $0,088 > 0,05$ sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian variabel X_2 memiliki kontribusi terhadap Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa Jumlah Penduduk yang menempati suatu daerah akan berpengaruh terhadap pelayanan yang akan diberikan oleh Pemerintah Daerah. Jumlah Penduduk yang semakin besar, maka akan menuntut Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Adanya tuntutan tersebut menjadikan Pemerintah terdorong untuk meningkatkan kinerja (dalam hal ini Kemandirian Keuangan Daerah) dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Taryoko (2016) dan Darmanto (2012) yang menyatakan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariasih (2011) yang menyatakan Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

3. Pengaruh DAU terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan teknik analisis regresi linear berganda, variabel DAU memiliki koefisien regresi sebesar 2,279 nilai thitung sebesar 1,241 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,224. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan nilai thitung $>$ ttabel ($1,241 < 1,695$) dengan nilai signifikansi $0,224 > 0,05$ sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian variabel X_3 tidak memiliki kontribusi terhadap Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan DAU yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat belum digunakan dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien oleh Daerah, berarti penggunaan dana tersebut belum mencapai target atau tujuan

kepentingan publik serta penggunaannya belum untuk menghasilkan output yang maksimal atau berdaya guna.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari dkk (2016) dan Ikasari (2015) yang menyatakan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

4. Pengaruh DAK terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan teknik analisis regresi linear berganda, variabel DAK memiliki koefisien regresi sebesar 2,279 nilai t hitung sebesar $-2,257$ dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,799. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan nilai t hitung $>$ ttabel ($-2,257 < 1,695$) dengan nilai signifikansi $0,799 > 0,05$ sehingga H_0 diterima dan H_1 tolak. Dengan demikian variabel X_4 tidak memiliki kontribusi terhadap Y . Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar DAK dari Pemerintah Pusat maka tingkat kemandirian keuangan daerah semakin rendah, begitu pula sebaliknya. Yang berarti daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari Pusat.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Ikasari (2015) dan Marizka (2013) yang menyatakan DAU berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

L. Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
2. Hasil penelitian menunjukkan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
3. Hasil penelitian menunjukkan DAU tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
4. Hasil penelitian menunjukkan DAK tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
5. Hasil penelitian menunjukkan PDRB, Jumlah Penduduk, DAU dan DAK secara simultan berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

M. Daftar Pustaka

Augusty, Ferdinand. 2006. Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk skripsi, Tesis dan Disertai Ilmu Manajemen. Semarang: Universitas Diponegoro.

Alfarisi H S (2015) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah Di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2006-2013

Bryson, John. 2001. Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

BPS. 2015. Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2015. Yogyakarta: BPS Daerah Istimewa Yogyakarta

Darmayasa, I Nyomandan I Made Bagiada. 2013, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Bagi Hasil Pajak sebagai Penopang Kemandirian Keuangan

Daerah. Jurnal Bisnis Kewirausahaan. Vol 9. NO. 2 Juli 2013

Ghozali, Imam, 2005, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*,

Semarang, Badan Penerbit UNDIP.

Halim, Abdul. 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi. Salemba Empat : Jakarta.

Halim, Abdul 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi ke tiga. Salemba Empat : Jakarta.

Iksara P (2015) Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Diy Periode 2007-2014.

Marizka R(2011) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Barat (Tahun 2006 – 2011)

Tambunan, Tulus. 2002, Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting. Jakarta: Salemba

Taryoko (2016) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah Di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2006-2013 Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2016

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2004. Jakarta.

Yani, Ahmad. 2002. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.